

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif, M. Yasin al, 2017, *Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*, Hasil penelitian, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Bawaslu Sragen, 2020, *Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bawaslu*, Bawaslu, Sragen.
- Bawaslu Sragern, 2020, *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sragen*, Bawaslu, Sragen.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jonaedi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Mahfud, Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana :Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinaga, Dahlan, 2018, *Tindak Pidana Pemilu (Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, Bandung.

Suswanto, Gunawan, 2015, *PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF : Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Utrecht, E., 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Universitas Pajajaran, Bandung.

B. Jurnal

Aurelia Ika, Natasya, Sakir Ridho Wijaya, Fairuz Arta Abhipraya, *Kotak Kosong Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih Pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.14, No.2, Juli 2021.

Luthan, Salman, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1, Januari 2009.

Mitendra, Hario Mahar, *Fenomena dalam Kekosongan Hukum*, Rechtsvinding, April 2018.

Nasir, Gamal Abdul, *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Vol.5, No. 2, September 2017.

Simamora, Janpatar, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, Februari 2011.

Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, *Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi*, Jurnal Yudisial, Vol. 12, No. 3, Desember 2019.

Satory, Agus, Hotma Pardomuan Sibuea, *Problematisasi Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-undangan*, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 06, No. 01, Januari 2020.

C. Hasil penelitian/Tugas Akhir

Arif, M. Yasin al, 2017, *Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak*, Hasil penelitian, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mahligai, Manik Lintang Suh, 2019, *Strategi Kampanye Kotak Kosong Oleh Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mahpudin, 2021, *Gerakan Kotak Kosong Sebagai Electoral Movement : Studi tentang Gerakan Bajukoko (Barisan Juang Kotak Kosong) Melawan Dominasi Kekuasaan Calon Tunggal pada Pilkada Kabupaten Lebak 2018*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suyanto, Agus, 2020, *Pengawasan Pemilu di Indonesia (Studi Kasus Relawan Kotak Kosong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yodi, Aris Setiawan, 2021, *Fenomena Non Petahana dalam Pilkada dengan Calon Tunggal Tahun 2020 (Studi Kasus : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo)*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.

D. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23).

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057).

PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1385).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.100/PUU-XIII/2015.

E. Internet

Bawaslu, *Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban*,

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses 13 Oktober 2021.

Duhri, Muh.Khodiq, *CEK FAKTA : Ada Bagi-Bagi Duit Rp 20.000,- di Pilkada Sragen?*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201209/621/1328585/cek-fakta-ada-bagi-bagi-duit-rp20000-di-pilkada-sragen> , diakses 23 Oktober 2021.

KPU, *Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan*, <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/> , diakses 12 Oktober 2021.

KPU Bogor Kota, Arief : *Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran*, <https://kpu-bogorkota.go.id/index.php/post/detail/618/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran>, diakses 13 Oktober 2021.

Rahayu, Tri, *Kampanye Kotak Kosong Alami Kekosongan Hukum*, Solopos, 4 Oktober 2020.

Saiful Annam & Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> , diakses 19 Oktober 2021.